

KAJIAN TENTANG HUBUNGAN STRATEGIS PRODUSEN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

Henny Indrawati

Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau

Email: pku_henny@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan strategis antara petani kelapa sawit peserta plasma dengan perusahaan inti di Kabupaten Pelalawan. Hubungan strategis yang terjalin selama ini adalah PT. Asian Agri sebagai perusahaan inti melakukan kemitraan dengan petani plasmanya melalui pola PIR dan KKPA. Hubungan ini dimaksudkan supaya adanya hubungan yang saling menguntungkan antara petani plasma sebagai produsen kelapa sawit (TBS) dengan PT. Asian Agri sebagai pembeli kelapa sawit yang diproduksi petani.

Kata Kunci: petani plasma, perusahaan inti, pola PIR, pola KKPA

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di Provinsi Riau karena perannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama petani perkebunan. Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah karena: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan, keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit sehingga menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi yang letaknya berdekatan dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2003).

Peran penting lain dari kelapa sawit bagi Provinsi Riau adalah sebagai sumber perolehan devisa negara. Ekspor CPO Riau tahun 2008 mencapai angka 5,5 juta metrik ton. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah ekspor CPO tahun 2007 yang hanya sebesar 4,7 juta metrik ton (Ferry, 2009). Pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau membawa perubahan besar terhadap keadaan masyarakat pedesaan dan mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Begitu juga timbulnya kesempatan berusaha, seperti membuka kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumahtangga, serta jasa perbankan.

Kelapa sawit di daerah Riau merupakan tanaman primadona yang mendorong masyarakat di luar program PIR-BUN mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam kelapa sawit secara swadaya. Akibatnya perkebunan kelapa sawit berkembang begitu cepat di daerah Riau. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 1,61 juta hektar atau sekitar 27 persen dari total luas perkebunan sawit di Indonesia (Dinas Perkebunan Provinsi Riau,

2008). Untuk masa-masa mendatang, luas area perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit.

Tabel 1
Perkembangan Luas Area Komoditi Utama Perkebunan
di Provinsi Riau tahun 2000-2007 (dalam Ha)

Tahun	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet
2000	1.022.318,00	639.877,00	547.453,00
2001	1.119.798,00	639.877,00	566.130,00
2002	1.313.467,00	582.123,00	547.123,00
2003	1.406.989,00	639.340,00	544.735,00
2004	1.412.036,00	550.052,00	543.783,00
2005	1.424.814,21	546.938,13	528.734,48
2006	1.530.150,39	551.612,78	514.469,72
2007	1.611.381,60	552.021,69	532.900,79

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2008.

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu daerah yang merupakan bagian dari pusat pengembangan perkebunan khususnya kelapa sawit dalam tata ruang Provinsi Riau (Pemda Riau, 2005). Luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini pada tahun 2007 adalah 162.500 hektar dengan produksi 471.770 ton. Umur kelapa sawit berada pada usia produksi optimum yaitu umur 10-16 tahun (baik produksi TBS, minyak sawit dan minyak inti).

Di Kabupaten Pelalawan telah berkembang perkebunan kelapa sawit dengan perusahaan swasta sebagai inti yaitu PT. Asian Agri. Hubungan strategis yang terjalin selama ini adalah PT. Asian Agri sebagai perusahaan inti melakukan kemitraan dengan petani plasmanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, konsep kemitraan adalah perusahaan perkebunan sebagai inti melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, memperkuat, bertanggung jawab dan saling ketergantungan dengan masyarakat di sekitar perkebunan sebagai plasma. Dengan adanya kemitraan akan membantu memperbesar skala usaha dan meningkatkan efisiensi produksi perusahaan.

Jika petani membutuhkan biaya pemeliharaan, perusahaan akan menyediakan dana. Kemudian timbal baliknya, perusahaan memerlukan TBS untuk berproduksi dan petani plasma memenuhi permintaan tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketidakserasian hubungan antara petani plasma dan perusahaan inti. Penetapan harga dan rendemen Tandan Buah Segar (TBS) sering menjadi masalah yang dipertentangkan dan diduga masih menempatkan posisi petani lebih lemah dan sangat dipengaruhi oleh perilaku perusahaan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan rantai pemasaran kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan; dan mendeskripsikan hubungan strategis antara petani kelapa sawit peserta plasma dengan perusahaan inti di Kabupaten Pelalawan.

PEMBAHASAN

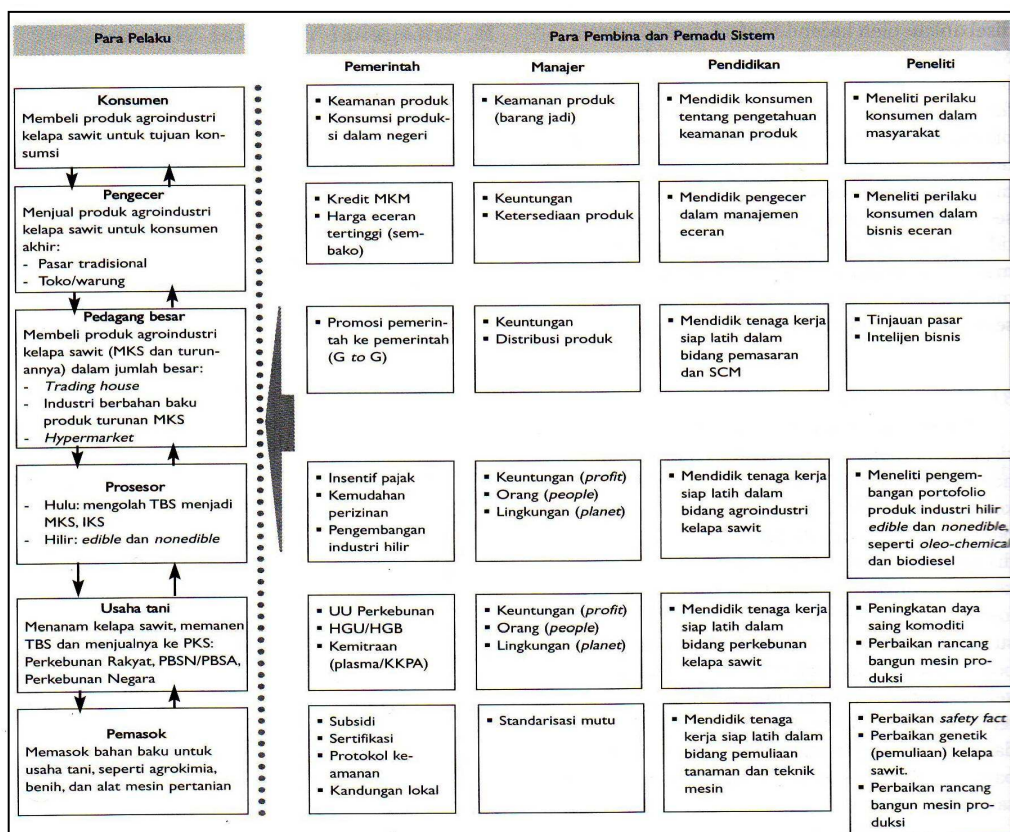
Integrasi Vertikal Sistem Agribisnis Kelapa Sawit

Konsep integrasi vertikal sistem agribisnis kelapa sawit merupakan keterpaduan sistem komoditas secara vertikal yang membentuk suatu rangkaian pelaku-pelaku yang terlibat dalam sistem tersebut, mulai dari produsen/penyedia

input/sarana produksi pertanian, distributor input/sarana produksi, usahatani, pedagang pengumpul, pedagang besar, usaha pengolahan hasil pertanian (agroindustri), pedagang pengecer, eksportir, hingga konsumen domestik dan internasional.

Arah panah ke atas menunjukkan aliran produk dan sebaliknya arah panah ke bawah merupakan arah aliran uang atau nilai produk. Di luar sistem aliran produk dan uang tersebut terdapat para fasilitator mekanisme sistem yang berperan sebagai pembina dan pemandu sistem, seperti pemerintah, manajer, pendidik, dan peneliti.

Pemerintah berperan sebagai pembina, pengatur, dan pengawas beroperasinya mekanisme sistem agribisnis kelapa sawit secara vertikal. Pembinaan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memperkuat ikatan keterpaduan antarpelaku. Pengaturan dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak dan kewajiban antarpelaku secara proporsional, sekaligus menyediakan sarana pelayanan yang mampu menjamin terselenggaranya integrasi sistem agribisnis kelapa sawit dengan kuat. Pengaturan ini tidak dimaksudkan sebagai campur tangan pemerintah pada sistem agribisnis kelapa sawit secara langsung (seperti tata niaga), atau sebagai pelaku. Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya sistem agribisnis kelapa sawit berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan proporsional. Dengan pengawasan ini, pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan pengendalian jika terjadi penyimpangan arah dan tujuan sistem.



Gambar 1
Matriks Integrasi Vertikal Sistem Agribisnis Kelapa Sawit Indonesia

Menurut Badrun (1996) pembangunan/pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR ini pada dasarnya bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran, antara lain: a) Meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah melalui keikutsertaannya sebagai pemilik kebun plasma dengan harapan mampu menerapkan teknologi yang sesuai sehingga kebunnya berada pada tingkat produktifitas yang tinggi; b) Sebagai upaya pendistribusian kekayaan nasional kepada masyarakat, melalui pendistribusian kredit untuk pembangunan kebun, pendistribusian lahan melalui pemberian sertifikat tanah; c) sebagai upaya penyebaran pembangunan ke berbagai wilayah baru yang belum terjamah pembangunan teristimewa daerah terpencil dengan prasarana yang sangat tidak memadai sekaligus berperan sebagai pusat pertumbuhan; d) Memadukan perusahaan besar sebagai inti dari perkebunan rakyat sebagai plasma untuk mentransfer teknologi dan pertumbuhan kelembagaan-kelembagaan baru dikalangan masyarakat yang lebih maju.

Di Kabupaten Pelalawan, PT. Asian Agri berperan sebagai pembina teknis. Dalam hal ini, perusahaan yang membuka dan menyiapkan kebun untuk petani, kemudian petani mencicil harga kebun tersebut ke perusahaan. Ini dilakukan setelah empat tahun, dan setelah ada penilaian teknis guna mengetahui apakah kebun tersebut layak dikonversikan untuk menjadi milik petani atau tidak.

Untuk kebun yang dinilai layak, dilaksanakan konversi (akad kredit) antara petani (kelompok tani) dan bank pelaksana. Petani membayar kewajibannya kepada bank melalui potongan hasil penjualan TBS kelapa sawit kepada PT. Asian Agri. Dalam hal ini, petani mempercayai PT. Asian Agri untuk melakukan penyeteroran tiap bulan kepada bank pelaksana. Pola kemitraan ini berjalan selama ada kebun plasma dan inti pada areal tersebut, karena kapasitas pabrik dirancang untuk menampung TBS dari kebun inti dan plasma. Pola pertama ini mengacu pada Inpres No. 1/1986.

Asian Agri berkewajiban membeli produksi TBS, mengolah dan memasarkannya. Asian Agri membeli produksi TBS kebun plasma sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Provinsi Riau. Pembinaan terhadap petani plasma selanjutnya adalah pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas perkebunan dengan menunjuk seorang atau beberapa orang ADO (*Area Development Officer*) untuk bekerjasama dengan Asian Agri agar kualitas produksi yang dikirim ke pabrik sesuai dengan standar mutu TBS yang ditetapkan Dirjenbun.

Program PIR sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, setidaknya mampu membuka isolasi wilayah dengan dibangunnya jalur transportasi. Program PIR telah mampu menggerakkan perekonomian di daerah pedalaman karena berputarnya uang dalam jumlah besar. Namun, di lapangan program PIR menghadapi kendala, baik kendala teknis budidaya perawatan kebun maupun kendala non teknis seperti manajemen usahatani dan manajemen ekonomi rumah tangga petani.

Permasalahan teknis yang menonjol dari program PIR adalah kondisi tanaman yang populasinya tidak penuh (kepadatan tanaman di bawah 136 pohon per hektarnya) dan pertumbuhannya tidak standar. Hal ini mengakibatkan produktivitas rendah dan terus merosot (kurang dari 12 ton/hektar/tahun). Ditambah lagi dengan perilaku petani yang kadang tidak sesuai dengan aturan teknis budidaya tanaman. Produktivitas kebun plasma yang rendah menyebabkan PKS kekurangan bahan baku. Selain itu, kualitas TBS petani yang rendah menyebabkan pendapatan petani kurang dan kurang mampu membiayai pemeliharaan kebun dengan baik.

Sementara itu, permasalahan nonteknis yang terjadi adalah macetnya pengembalian kredit oleh petani. Secara tidak langsung masalah ini sebenarnya

merupakan efek lanjut dari masalah teknis. Hasil kebun yang rendah mengakibatkan pendapatan petani berkurang dan tidak mampu membayar kredit. Bahkan tak jarang petani memilih menjual kavelingnya atau menjual hasil kebunnya kepada pihak lain untuk menghindari pembayaran kredit. Selain karena faktor pendapatan petani, kredit macet juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi nilai kredit sehingga banyak petani yang tidak paham.

Masalah-masalah yang terjadi tersebut dipicu oleh kurangnya pembinaan dan pendampingan dari dinas (instansi) terkait maupun pihak perusahaan inti setelah kebun diserahkan kepada petani plasma. Ditambah lagi, pendekatan perusahaan banyak hanya berorientasi kepada produksi. Nyatanya, dengan kurangnya pembinaan dan pendampingan menjadikan produktivitas kebun menurun. Pembinaan yang kurang menjadikan pemberdayaan tidak berjalan. Intensitas hubungan yang kurang juga menjadikan kesamaan persepsi tidak tercapai dan keharmonisan hubungan tidak dapat terwujud. Akhirnya petani dan perusahaan mendapatkan kerugian.

Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer kepada Anggota)

Kemitraan pola KKPA merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota melalui kredit jangka panjang dari bank. Perusahaan inti sebagai pengembang (*developer*) melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit untuk petani plasma dengan biaya pembangunan dari kredit bank sampai tanaman kelapa sawit menghasilkan. Perusahaan inti juga membangun kelembagaan petani sebagai wadah pembinaan dan bimbingan bagi petani peserta mengenai budi daya dan manajemen perkebunan kelapa sawit. Pembinaan minimum dilakukan selama satu siklus tanam.

Pada pola kemitraan KKPA, perusahaan inti bertanggung jawab atas pengembalian kredit bank. Angsuran kredit ini diambil dari pemotongan hasil jual TBS dari petani plasma. Artinya, petani wajib menjual hasil kebunnya pada perusahaan inti. Dalam hal ini, perusahaan inti wajib membeli hasil TBS petani plasma dengan harga yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Selama proses ini, koperasi sebagai wadah petani berhak untuk melakukan pengawasan pada perusahaan inti. Selanjutnya, setelah semua kewajiban petani anggota terselesaikan, perusahaan inti wajib menyerahkan sertifikat kebun kepada petani.

Pola KKPA diterapkan oleh PT. Asian Agri sejak 1995, yaitu lahan tetap dikelola PT. Asian Agri sampai satu siklus tanaman (usia produktif sekitar 25-30 tahun). Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan penduduk di pedesaan dan petani dalam wadah koperasi. Pendanaannya berdasarkan persetujuan pinjaman yang dibuat antara bank dan koperasi. Petani di bawah naungan koperasi unit desa yang berbadan hukum akan menerima bagi hasil secara prorata setiap bulan. Berdasarkan SK Gubernur Riau No. 07/2001, melalui KUD, lahan disediakan oleh masyarakat. Koperasi mencari bapak angkat (perusahaan inti), dalam hal ini PT. Asian Agri, dan mengajukan permohonan dana ke bank. Bank meminta PT. Asian Agri sebagai avalis (penjamin) dan menyewa konsultan independen untuk supervisi kebun.

Perusahaan membangun dan mengelola kebun KKPA berdasarkan *memorandum of understanding* pengelolaan kebun antara inti dan KUD sampai batas waktu tertentu. Pola kerja samanya adalah konversi hasil, yakni kebun dikelola perusahaan dan petani menerima bagi hasil. Untuk menjaga transparansi di KKPA, maka dilibatkan unsur petani dari KUD.

Koperasi petani yang mengelola perkebunan kelapa sawit rakyat adalah koperasi primer yang telah berbadan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pelaksanaan kemitraan, terlebih dahulu koperasi harus membuat perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit untuk anggota secara tertulis dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja yang mempunyai keahlian dibidang perkebunan kelapa sawit. Untuk memperoleh dana KKPA, koperasi harus mengajukan permohonan kepada bank pelaksana melalui dan atau bekerjasama dengan perusahaan inti sebagai mitra.

Kendala yang terjadi pada pola KKPA terutama setelah kebun diserahkan kepada petani. Beberapa diantaranya adalah ketidakseragaman petani atau kelompok tani dalam melakukan tanggung jawabnya untuk mengelola kebun setelah kebun diserahkan. Ada petani yang serius dalam perawatan kebun, ada juga petani yang kurang perhatian terhadap kebunnya.

PENUTUP

Bagi Provinsi Riau, kelapa sawit mempunyai peran yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama petani perkebunan. Kabupaten Pelalawan adalah salah satu daerah yang merupakan bagian dari pusat pengembangan perkebunan khususnya kelapa sawit dalam tata ruang Provinsi Riau. Di Kabupaten Pelalawan telah berkembang perkebunan kelapa sawit dengan perusahaan swasta sebagai inti yaitu PT. Asian Agri. Hubungan strategis yang terjalin selama ini adalah PT. Asian Agri sebagai perusahaan inti melakukan kemitraan dengan petani plasmanya melalui pola PIR dan KKPA. Hubungan ini dimaksudkan supaya adanya hubungan yang saling menguntungkan antara petani plasma sebagai produsen kelapa sawit (TBS) dengan PT. Asian Agri sebagai pembeli kelapa sawit yang diproduksi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi Syahza, 2003, Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, *Jurnal Ekonomi*, Th. VIII/01/Juni/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- Badrun, M, 1996 *Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) Kemitraan Usaha Besar Dalam Agribisnis Perkebunan*, Jakarta: Yayasan Gramedia.
- Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, 2009, *Pengembangan Kelapa Sawit Nasional, Mewujudkan Visi Indonesia 2020*, <http://ditjenbun.deptan.go.id>, diakses 10 Januari 2010.
- Ferry Erna Putra, 2009, *Ekspor CPO Riau Naik 800 Ribu Metrik Ton*, <http://sawitsumatera.blogspot.com/2009/04/2008-ekspor-cpo-riau-naik-800-ribu.html>, diakses 10 Januari 2010.
- Mohammad Jafar Hafsah, 2000, *Kemitraan Usaha, Konsep dan Strategi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sunarko, 2009, *Budidaya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*, Cetakan Pertama, Jakarta: AgroMedia Pustaka.